



China's Road To Zero Hunger: Implementasi Sustainable Development Goals Dalam Memenuhi Food Security di Republik Rakyat Tiongkok

Benjamin Juliano Pardede

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

After the end of the Millennium Development Goals, existing countries began to make a new formulation to continue sustainable development. The results of the new formulation that will continue the MDGs called Sustainable Development Goals which are now became the standard for countries in conducting sustainable development. A country's compliance with SDGs itself can be seen from how a country implements the SDGs in order to achieve the goals that have been formulated. DNV GL, an innovation and technology based company makes a prediction of the possibility of achieving the goals in the SDGs and turns out that China has a green indicator in the second goal, Zero Hunger. This study intends to explain the efforts made by China in achieving the second goal of the SDGs and fulfilling the food security of the country. This research will use the concept of policy implementation that will analyze the factors that contribute to the realization of a policy such as policy standards and policy objectives, resources, economic, social, and political environment that supports China in carrying out the policies that have been designed. In addition, this research will also use the concept of food security namely availability, accessibility, utilization and stability to see whether China has fulfill the food security in the country. This study found that agricultural modernization and the green industry conducted by China have standards and policy objectives, resources, economic, social, political environment that supports the achievement of SDGs. However, China has not fulfilled food security in its country because haven't fulfill all of the indicators from food security.

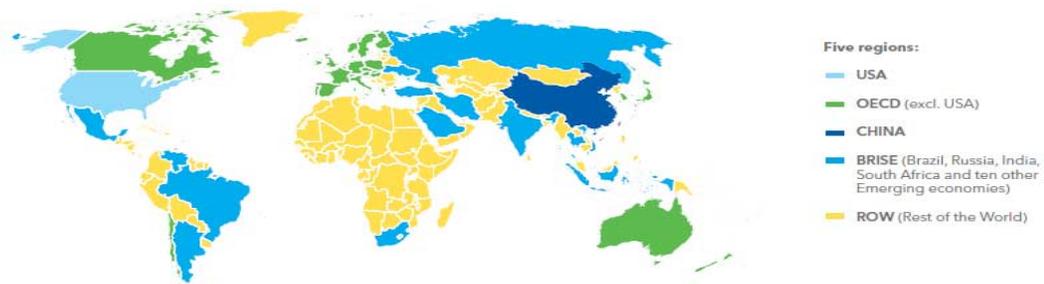
Keywords: *China, Food Security, Sustainable Development Goals, Agricultural Modernization, Green Industry*

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara yang memiliki lebih dari 1,3 milyar penduduk, Tiongkok masih memiliki masalah pangan yang cukup signifikan. Masalah ketahanan pangan akan menjadi lebih sulit bagi Tiongkok di tahun-tahun yang akan datang karena beberapa faktor seperti populasi Tiongkok yang terus meningkat diikuti dengan kebutuhan pangan yang terus bertambah pula. Selain itu, kuantitas makanan bukanlah satu-satunya masalah di Tiongkok, melainkan kualitas makanan yang juga menjadi faktor penting dalam ketahanan pangan Tiongkok sendiri. Selama lima tahun terakhir, persediaan bahan pangan bagi 1,3 milyar warga Tiongkok menipis dan harga

bahan pangan terus melonjak (DW, 2008) dan hal ini menimbulkan pertanyaan apakah makanan di Tiongkok aman dan cukup untuk dikonsumsi oleh penduduknya.

Gambar 1. Prediksi yang dibuat oleh DNV GL dalam UN Private Sektor Forum.



Sumber: DNV GL, 2016

Dalam *official website*-nya, DNV GL – sebuah perusahaan yang bergerak di bidang inovasi dan teknologi membuat prediksi kemungkinan tercapainya *goals* dari tiap tiap negara anggota PBB dalam *UN Private Sektor Forum* pada September 2016 (Lihat Gambar 1). Dari indikator yang ada, negara negara anggota dikelompokkan menjadi lima *region* yang dibuat berdasarkan ukuran negara dan kekuatan ekonominya yaitu Amerika, OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) yang terdiri dari 36 negara anggota, China, BRISE (Brazil, Russia, India, South Africa, and ten other Emerging economies), dan ROW (Rest of the World). Dalam

table indikator tersebut, Tiongkok merupakan satu dari tiga *region* yang mendapat indikator hijau dalam goals *Zero Hunger*. Dengan kata lain, Persekutuan Bangsa Bangsa serta sektor swasta memandang optimis terhadap Tiongkok yang akan memenuhi kebutuhan pangannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa Tiongkok sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dalam memenuhi kebutuhan pangan di negaranya dan mencapai *Zero Hunger*, padahal penduduk di Tiongkok sampai sekarang masih mengalami pertumbuhan dan wilayah untuk melakukan peningkatan agrikultur mulai berkurang.

Penelitian ini merupakan analisis untuk melihat alasan mengapa Tiongkok dapat mencapai *Zero Hunger* dan bagaimana pengaruh implementasi kebijakan dalam membantu Tiongkok memenuhi kebutuhan pangannya di negaranya. Bab ini akan melihat bagaimana standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, serta kondisi ekonomi, sosial, dan politik dapat mendukung implementasi yang dilakukan oleh Tiongkok. Selain itu, bab ini juga akan menganalisis apakah Tiongkok memang sudah memenuhi *food security* di negaranya menggunakan empat konsep *food security* menurut *Food and Agricultural Organization* yaitu *availability*, *accessibility*, *utilization* dan *stability*.

Konsep implementasi kebijakan merupakan tindakan tindakan dalam keputusan yang mencakup usaha untuk mengubah keputusan keputusan menjadi tindakan tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha yang diarahkan untuk mencapai tujuan tujuan yang telah ditetapkan. Fase implementasi tidak dimulai sampai tujuan dan sasaran telah ditetapkan (atau diidentifikasi) oleh pembuat kebijakan (Meter & Horn, *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*, 1975). Selain itu, studi implementasi kebijakan akan digunakan untuk melihat faktor-faktor yang berkontribusi pada realisasi atau tidak terwujudnya tujuan dari suatu kebijakan kebijakan (Pressman & Wilavsky, 1975).Tiongkok melakukan dua implementasi yang dirancang dalam *The 13th Five Years Plan* yaitu *agricultural modernization* dan *green industry*.

PEMBAHASAN

Pemenuhan *food security* Tiongkok tidak jauh dari adanya modernisasi teknologi terutama dalam hal yang berkaitan dengan sektor agrikultur. Pemerintah Tiongkok percaya bahwa dengan adanya persebaran ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di wilayah pedesaan yang biasanya masih sangat tradisional dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas para petani melalui teknologi agrikultural yang semakin canggih. Adanya modernisasi dalam teknologi agrikultur ini juga diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dari perekonomian masyarakat dan mempercepat target Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan pangan di negaranya.

Kesuksesan Tiongkok dalam memaksimalkan modernisasi terhadap sektor agricultural akan dibahas menggunakan konsep implementasi kebijakan dimana tindakan tindakan yang dilakukan Tiongkok akan dipengaruhi oleh faktor standar dan sasaran kebijakan yang diambil dari *SDGs* sendiri, sumber daya yang memadai, dan juga lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung implementasi yang dilakukan oleh Tiongkok.

Dalam *13th Five Year Plan for Economic and Sosial Development*, implementasi yang dilakukan oleh Tiongkok didasarkan pada standar dan sasaran kebijakan yang diambil dari *SDGs* itu sendiri. Dalam hal ini, pada dasarnya modernisasi agrikultur yang dilakukan oleh Tiongkok memiliki beberapa tujuan yang sesuai dengan aspek *Zero Hunger* dalam *SDGs* yaitu mengentaskan kelaparan terutama bagi orang miskin dan menyediakan pangan cukup untuk sepanjang tahun. Selain itu, *SDGs* juga memiliki tujuan dan standar untuk memaksimalkan produktivitas dari sektor agrikultur, memastikan keberlanjutan pangan, dan juga menjaga keberagaman pangan. Dalam

modernisasi agricultural yang dilakukan oleh Tiongkok, ada beberapa aktor yang memiliki fungsi yang signifikan dalam membantu Tiongkok memaksimalkan proses modernisasi ini. Aktor yang cukup berperan tentu saja *Minister of Agriculture and Rural Affairs (MARA)* atau yang sekarang diganti menjadi *Ministry of Agriculture (MOA)*. MOA berperan dalam proses perancangan dan pengimplementasian kebijakan yang berhubungan dengan agrikultur, termasuk memastikan bahwa produk produk seperti *hybrid-rice* dan efisiensi dalam hal irigasi sampai ke pedesaan karena pada akhirnya, teknologi yang ada akan difokuskan pada wilayah pedesaan yang memang merupakan tempat dimana kebanyakan produk agrikultur tersebut diproduksi dan dengan adanya teknologi tersebut diharapkan dapat membuat adanya kemandirian dalam sektor pangan yang hasil akhirnya adalah untuk menghilangkan kemiskinan yang ekstrim sesuai dengan tujuan dan standar kebijakan yang sudah ditetapkan dalam *SDGs*. Selain MOA, *Food and Agricultural Organization* sebagai aktor internasional juga turut berperan dalam membantu Tiongkok memenuhi *food security*-nya. *FAO* sendiri memiliki badan yang berfungsi untuk meningkatkan peran pertanian dan secara khusus untuk mengurangi kelaparan dan kemiskinan (*FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2019*).

Suksesnya Tiongkok dalam proses pengimplementasian *13th Five Year Plan for Economic and Social Development* secara khusus dalam melakukan modernisasi sektor agrikultur juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Lingkungan sosial sendiri termasuk budaya konfusius yang sudah dianut Tiongkok sejak zaman Dinasti yang mengatakan bahwa keinginan untuk makan merupakan kebutuhan dasar dari sifat manusia. Ajaran ini membuat masyarakat Tiongkok memiliki kemampuan bertahan hidup yang baik. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang selalu mencoba mengembangkan berbagai jenis sayuran untuk bertahan hidup (*Zhou, 2007*). Adanya kebijakan domestik yang sejalan dengan *SDGs* tentunya akan mempermudah Tiongkok dalam menetapkan tindakan apa saja yang harus dilakukan Tiongkok dalam melakukan modernisasi agrikultur. Dalam *13th Five Year Plan for Economic and Social Development* sendiri, Tiongkok menetapkan beberapa tindakan yang akan dilakukan dalam modernisasi agrikultur yaitu menetapkan sistem perlindungan lahan, memperbaiki sistem irigasi, serta pemulihan lingkungan yang sebelumnya rusak karena industri (*China C. C., 2016*). Selain itu, dalam lingkungan ekonomi, Tiongkok memberikan subsidi dalam sektor agrikultur yang akan digunakan untuk membuat inovasi dalam ilmu dan teknologi agrikultur seperti *bio-breeding*, mesin agrikultur, serta metode produksi yang ramah lingkungan yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi dari bahan pangan. Namun, Tiongkok pada dasarnya memiliki kelemahan dalam hal komunikasi antar-organisasi. *Information asymmetry* sendiri merupakan kondisi ketika terdapat dua kelompok yang saling berhubungan tidak memiliki tingkat informasi yang sama dimana salah satu kelompok memiliki tingkat informasi yang lebih banyak dibandingkan kelompok lainnya (*Boyd, 2018*)

Dalam *13th Five Year Plan for Economic and Social Development*, Tiongkok juga merumuskan pembuatan industri hijau (*Green and Environmental-Friendly Industry*). Terlepas dari motif bahwa Tiongkok melakukan industri hijau ini sebagai salah satu bentuk dari implementasi Rencana Lima Tahun-nya, Tiongkok memang merupakan penghasil karbon tertinggi di dunia bahkan jika dibandingkan dengan jumlah gabungan antara Amerika dan Uni Eropa (*Rapier, 2018*). Sama seperti modernisasi agrikultur sebelumnya, program industri hijau juga bertujuan untuk menyelesaikan dan mencapai tujuan dan standar yang terkandung dalam *SDGs*. Tujuan yang pertama adalah untuk mencapai keberlanjutan pangan dengan cara memastikan adanya keberlangsungan dari produksi pangan namun tetap menjaga ekosistem yang ada. Selain itu, industri hijau ini juga bertujuan untuk mengentaskan malnutrisi pangan dengan cara standar

dapat mengurangi angka kurang gizi terutama untuk anak di bawah lima tahun dan secara umum untuk semua sektor masyarakat.

Dalam proses pengimplementasian industri hijau ini lingkungan politik beserta sumber daya merupakan dua faktor yang turut mendukung kesuksesan dari tindakan yang dilakukan. Pemerintah Tiongkok baru-baru ini mengambil pendekatan yang lebih proaktif dalam mengatur hukum lingkungan yang sebelumnya seringkali diabaikan dalam beberapa dekade terakhir. Tindakan ini telah memberikan hukuman bagi perusahaan yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar. Hukuman yang diberikan mulai dari denda dalam jumlah yang besar hingga hukuman penjara. Tindakan keras Tiongkok terhadap pabrik-pabrik pencemar lingkungan diharapkan akan menghasilkan udara yang lebih bersih dan pada akhirnya akan berdampak kepada kesehatan. Sebelumnya, sektor agrikultur di Tiongkok seringkali mengalami kenadala karena permasalahan lingkungan dan pada akhirnya membuat banyak gagal panen dengan faktor yang beragam dari mulai tanah yang terkontaminasi mineral serta polusi yang dihasilkan oleh industri industri besar di Tiongkok. Pada tahun 2016, pemerintah mulai melakukan serangkaian investigasi terhadap industri berat, dan sebagai hasilnya, beberapa pabrik baja yang tidak patuh dan ilegal, tambang batu bara, peleburan aluminium, dan unit manufaktur lainnya ditutup. Hingga saat ini, diperkirakan lebih dari 80.000 pabrik telah ditutup di seluruh negeri sebagai upaya anti-polusi. Perusahaan lain yang diketahui melanggar peraturan lingkungan telah diperintahkan untuk membersihkan operasi mereka dalam jangka waktu yang singkat atau akan ditutup oleh pihak yang berwenang (Raman, 2017)

Dalam lingkungan sosial, Pemerintah Tiongkok mendorong pengimplementasian *SDGs* dalam aspek budaya, pemerintah terus menerus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan hijau, melatih orang untuk melakukan pembangunan hijau, dan membangun sistem budaya hijau secara sosial. Inti dari menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai budaya hijau adalah mengembangkannya kesadaran ekologis warga tentang moralitas ekologis, dan kesadaran akan tanggung jawab terhadap lingkungan. Terdapat fenomena yang sering menganggap bahwa pembangunan hijau bertentangan dengan pembangunan ekonomi. Beberapa pemerintah daerah percaya bahwa pembangunan hijau merupakan hambatan bagi pembangunan ekonomi, dan akan membuat PDB turun. Fenomena membuat pemerintah daerah percaya bahwa pembangunan hijau akan menghambat pembangunan ekonomi lokal. Pemahaman yang salah tentang sifat pembangunan hijau telah menyebabkan resistensi emosional dan kesulitan dalam operasi dalam mempromosikan konsep pembangunan hijau. Namun, setelah masyarakat di Tiongkok mulai merasakan dampak negatif dari adanya pembangunan ekonomi yang seringkali menimbulkan adanya polusi yang berdampak terhadap gagal panen pada sektor agrikultur dan masalah kesehatan, masyarakat di Tiongkok mulai menyadari pentingnya pembangunan hijau dalam kehidupan mereka.

Dalam lingkungan ekonomi, Tiongkok merupakan investor terbesar dalam pembuatan industri hijau dan energi terbarukan dan mengeluarkan jumlah uang sebanyak \$126,6 miliar. Laporan menunjukkan bahwa Tiongkok telah memimpin dalam energi terbarukan dan sekarang menjadi produsen, eksportir dan penginstal panel surya, turbin angin, baterai dan kendaraan listrik terbesar di dunia (Dudley, 2019). Tiongkok juga memiliki keunggulan dalam hal teknologi dengan lebih dari 150.000 paten energi terbarukan pada 2016, 29% dari total global sedangkan Amerika Serikat memiliki kurang lebih 100.000 paten disusul dengan Jepang dan Uni Eropa yang masing-masing memiliki hampir 75.000 paten. Meskipun tidak semua paten bermanfaat, angka-angka ini memberikan indikasi berapa banyak investasi yang telah dilakukan berbagai negara dalam industri ini.

Dalam *green industry* sendiri, terdapat komunikasi yang baik antara institusi yang bertindak sebagai perancang kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yaitu *Ministry of Agriculture* dan *Ministry of Environmental Protection* dimana kedua institusi ini bekerja sama dalam melakukan penegakan terhadap hukum lingkungan yang ada. Meskipun hukum lingkungan sudah lama dirancang untuk meminimalisir dampak lingkungan dari perusahaan kelas berat di Tiongkok namun seringkali eksekusi yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan hukum yang sudah dirancang sebelumnya. *Ministry of Environmental Protection* memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan Tiongkok dapat memenuhi ketersediaan pangan di negaranya juga meminimalisir terjadinya gagal panen pada sektor agrikultur sehingga masalah kesehatan dapat dituntaskan sesuai dengan nilai nilai yang sudah dirancang dalam *Sustainable Development Goals*.

Pemerintah Tiongkok seringkali mengumumkan bahwa Tiongkok sudah swasembada dalam hal pangan. Namun, ketahanan pangan tidak hanya berbicara soal ketersediaan pangan, melainkan juga akses dan juga masalah kesehatan. Untuk melihat apakah benar Tiongkok sudah berhasil memenuhi ketahanan pangan di negaranya, penulis akan menggunakan konsep *food security* yang dirumuskan oleh *FAO* yang terdiri dari empat pilar yaitu *availability*, *accessibility*, *utilization*, dan *stability*. Konsep *food security* yang dikeluarkan oleh *FAO* diturunkan oleh Nie Fengying untuk melihat indikator indikator apa saja yang dapat digunakan untuk melihat apakah Tiongkok dapat memenuhi *food security*-nya. Dalam ketersediaan pangan (*availability*), suatu negara dapat dikatakan memenuhi ketersediaan pangannya dilihat dari total pasokan makanan dan hasil makanan perkapita dari Tiongkok. Selama tiga dekade terakhir, Tiongkok telah berhasil mengangkat rekor jumlah orang yang keluar dari kemiskinan dan mencapai peningkatan pesat dalam pemenuhan standar kehidupan. Keberhasilan Tiongkok ini seringkali dijadikan sebagai contoh yang sangat baik dari negara berkembang yang telah berhasil dalam meningkatkan produktivitas dan ketersediaan pangan (*availability*).

Food and Agricultural Organization memandang bahwa meskipun terdapat jumlah pangan yang cukup baik dalam skala nasional maupun internasional tidak berarti bahwa kebutuhan akan pangan telah terpenuhi, namun yang paling penting adalah akses orang-orang terhadap pangan itu sendiri yang harus dibantu dengan adanya kebijakan yang mengatur mengenai pendapatan, harga pasar, agar semua orang dapat memenuhi tingkat kebutuhan pangannya dan mencapai konsep ketahanan pangan itu sendiri. Akses masyarakat terhadap pangan sendiri dapat dilihat dari pendapatan per kapita tahunan masyarakat di pedesaan dan masyarakat di perkotaan dimana peningkatan terhadap pendapat merupakan indikasi meningkatnya konsumsi masyarakat serta peningkatan gaji yang pada akhirnya digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Ketika 2015 Tiongkok mulai mengeluarkan kebijakan yang mendukung adanya implementasi *SDGs*, terdapat peningkatan yang cukup signifikan dimana PDB Tiongkok meningkat sebanyak 6,15% dari tahun 2015 hingga 2016, 6,17% dari tahun 2016 hingga 2017, dan 6,11% dari tahun 2017 hingga 2018. Sedangkan dalam PCNIRH, Tiongkok juga mengalami pertumbuhan yang signifikan meskipun masih terdapat ketimpangan antara masyarakat di pedesaan dan perkotaan.

Pemanfaatan (*utilization*) dalam *food security* menurut *FAO* dapat diartikan sebagai cara tubuh manusia untuk mengolah berbagai nutrisi yang ada dalam makanan. Energi yang cukup dalam tubuh manusia akan memberikan efek yang baik tubuh manusia sehingga diperlukan makanan yang memiliki nutrisi yang tinggi dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan manusia. Komponen penting yang dilihat dari keamanan pangan dan gizi di Tiongkok adalah untuk memastikan bahwa makanan tidak hanya tersedia dan dapat diakses tetapi aman dikonsumsi dan

tidak menyebabkan penyakit kepada masyarakat yang mengkonsumsinya atau dengan kata lain bagaimana cara Tiongkok memastikan tingkat kesehatan di negaranya baik dalam meningkatkan kualitas hasil pangan di negaranya agar dapat meminimalisir masalah kesehatan di negaranya dan meminimalisir terjadinya malnutrisi yang dapat berdampak ke berbagai penyakit lainnya.

Gambar 2. Kemajuan Tiongkok Terhadap Target Nutrisi Global 2019

Progress against global nutrition targets 2019



Sumber: China Nutrition Profile, 2019

Meskipun Tiongkok mengalami pertumbuhan yang sangat baik di berbagai sektor dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, masih ada 150 juta orang di Tiongkok yang dianggap kurang gizi (Perez E, 2016). Kebanyakan dari mereka yang menderita kelaparan adalah wanita, anak-anak dan orang tua yang berasal dari daerah pedesaan. Kemiskinan di wilayah perkotaan mungkin sudah berkurang. Namun, masih terdapat 1,6 persen dari populasi perkotaan yang hidup di bawah garis pendapatan minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, terlebih lagi banyak penduduk pedesaan belum dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan yang dialami Tiongkok karena belum ada pemerataan antara masyarakat di kota dan desa. Dalam gambar 3.4, terdapat gambaran bagaimana Tiongkok masih memiliki masalah dalam sektor kesehatan dimana dari sepuluh indikator kesehatan yang ada, hanya terdapat dua yang sudah yang sudah mendapatkan tindakan, satu indikator dalam proses, sementara yang lainnya belum memiliki proses dan bahkan terdapat kemungkinan untuk semakin memburuk.

Stability merupakan kondisi dimana terdapat keseimbangan dan keberlanjutan dari ketersediaan pangan (*availability*), akses masyarakat (*access*), dan tingkat kesehatan (*utilization*). Manusia yang hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan makanannya secara cukup untuk jangka waktu yang sebentar dikarenakan berbagai alasan masih dikatakan *food insecure* karena orang tersebut tidak mendapat hasil pangan dalam jangka panjang ataupun akses yang pada akhirnya akan beresiko dalam status gizi orang tersebut. Untuk dapat memenuhi pilar keempat ini, pemerintah Tiongkok harus berupaya untuk memastikan adanya keberlangsungan dari pasokan makanan, akses masyarakat yang dapat berupa peningkatan gaji dan pemberian subsidi, serta memaksimalkan kualitas makanan dan meminimalisir tingkat malnutrisi di negaranya.

Dalam memenuhi pilar *stability*, Tiongkok membuat kebijakan kebijakan serta rencana jangka panjang seperti *The 13th-Five-Years-Plan* dan *National Nutritional Plan (2017–2030)* yang digunakan untuk meningkatkan sektor sektor yang penting dalam memenuhi *foods security* di negaranya. Upaya Tiongkok dalam memastikan ketersediaan pangan sendiri sudah dirancang dalam *The 13th-Five-Years-Plan* melalui tindakan seperti modernisasi agrikultur (Part IV, Chapter 20) yang berusaha untuk mengembangkan berbagai teknologi untuk mengembangkan sektor pertanian yang lebih modern, efisien, serta merata sampai ke pedesaan. Begitu juga dengan akses masyarakat dimana Tiongkok berupaya untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak untuk menjembatani kesenjangan pendapatan antara masyarakat di perkotaan dan di pedesaan

(Part XV, Chapter 62). Sedangkan untuk masalah kesehatan, Tiongkok sudah membuat *National Nutritional Plan* yang bertujuan untuk membuat suatu sistem pengaturan standar untuk nutrisi yang akan diterapkan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten secara bertahap.

Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa Tiongkok belum benar benar memenuhi ketahanan pangan di negaranya berdasarkan keempat pilar *food security* yang dirumuskan oleh *FAO*. Tiongkok mungkin sudah sangat berhasil dalam meningkatkan pangannya dengan sangat pesat dibandingkan negara berkembang lainnya. Namun, ketersediaan pangan tidak menjadi satu satunya indikator untuk melihat apakah suatu negara sudah tahan terhadap pangan, namun harus ada akses yang cukup oleh masyarakat terhadap pangan tersebut serta adanya tingkat kesehatan yang baik dari masyarakat di negara tersebut. Terlebih lagi, ketiga pilar tersebut harus dapat dipenuhi secara terus menerus untuk jangka waktu yang panjang untuk memastikan bahwa suatu negara benar benar sudah memenuhi ketahanan pangannya.

KESIMPULAN

Kesuksesan Tiongkok dalam melaksanakan implementasi dari *Sustainable Development Goals* untuk memenuhi ketahanan pangannya adalah karena Tiongkok secara khusus mengintegrasikan nilai nilai yang terkandung dalam *SDGs* dalam kebijakan domestiknya yaitu *The 13th-Five-Years-Plan* sehingga Tiongkok memiliki gambaran untuk membuat tindakan tindakan yang sekiranya dapat digunakan untuk mencapai standar dan tujuan yang ada. Selain itu, kesuksesan Tiongkok juga didukung dengan adanya sumber daya serta lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, dan lingkungan politik serta adanya komunikasi yang baik antar organisasi yang mendukung proses pengimplementasian kebijakan juga karakteristik institusi yang memiliki mekanisme yang secara khusus mengatur pengimplementasian kebijakan yang pada akhirnya mendukung Tiongkok dalam melakukan implementasi kebijakan tersebut.

Adapun implementasi kebijakan yang dilakukan Tiongkok untuk memenuhi *food security*-nya adalah melakukan modernisasi pada sektor agrikultur dan industri hijau. Modernisasi pada sektor agrikultur dirancang untuk mengentaskan masalah ketersediaan pangan di Tiongkok dan memenuhi akses masyarakat terhadap bahan pangan, sedangkan industri hijau dirancang untuk mengurangi polusi yang ada di Tiongkok dengan harapan dapat memberikan dampak yang positif terhadap kualitas hasil produksi pada sektor agrikultur di Tiongkok yang sebelumnya masih bermasalah dikarenakan polusi yang berlebihan. Dalam konsep *food security*, suatu negara dikatakan berhasil memenuhi ketahanan pangannya ketika negara tersebut memenuhi keempat indikator yang dirumuskan oleh *Food and Agricultural Organization (FAO)* yaitu, *availability*, *accessibility*, *utilization* dan *stability*. Melalui penelitian ini, penulis menarik kesimpulan bahwa Tiongkok belum dapat dikatakan memenuhi *food security* di negaranya karena Tiongkok hanya berhasil memenuhi tiga dari empat indikator *food security* yang ada. Ketersediaan pangan yang meningkat secara pesat tidak menjadi satu satunya indikator untuk membuktikan bahwa suatu negara sudah memenuhi ketahanan pangannya, namun negara tersebut juga harus memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap bahan bahan pangan tersebut serta memastikan bahwa hasil produksi pangan berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakatnya.

REFERENSI

- Chen, Gang, & Wang, J. (2017). Cultural change of food in anthropological perspective. *National Journal* 2, 34-41.
- Chen, J. (2007). Rapid urbanization in China: A real challenge to soil protection and *food security*. *ScienceDirect*, 12-15.

- Christiansen, F. (2009). *Food security, Urbanization and Social Stability in China*. *Journal of Agrarian Change*, 9(4), 5.
- FAO. (2008). *An Introduction to the Basic Concepts of Food Security*. Retrieved from Four dimensions of food security: <file:///C:/Users/lenovo/Desktop/KEBUTUHAN%20MPHI/FAO%20food%20security.pdf>
- FAO. (2019). *Food and Agriculture Organization of the United Nations*. Retrieved from Agriculture and Consume Protection Department: <http://www.FAO.org/agriculture-consumer-protection-department/en/>
- Fengying, N. (2020). Study on China's *Food security* Status. *Agriculture and Agricultural*
- IFAD. (2019). *Nutrition*. Retrieved from International Fund for Agriculture Development: <https://www.ifad.org/en/nutrition#>
- International, F. D. (2017, October 8). *Future Direction: Publication*. Retrieved from Future Directions International Pty Ltd: <http://www.futuredirections.org.au/publication/agricultural-subsidies-china-increasing-mechanisation-cutting-waste-cleaning-environment/>
- Nutrition, G. (2019). *China Nutrition Profile*. Retrieved from Country overview: <https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/eastern-asia/china/>
- Meter, V. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society* 1975 6: 445, 29.
- Miles, & Huberman. (1984). Qualitative Data Analysis: Handout. *A Sourcebook of New Method*, 15-22.
- Perez, E. (2016, September 11). *Malnutrition in China*. Retrieved from Overcoming Huger in Rural Areas: <https://borgenproject.org/malnutrition-in-china/>
- Pressman, & Wilavsky. (1975). The Policy Implementation Process. *Administration & Society*, 448.
- Raman, S. (2017, December 11). *China's Pollution Crackdown and its Impact on Business*. Retrieved from China Briefing: <https://www.china-briefing.com/news/chinas-pollution-crackdown-business-impacts/>
- Rapier, R. (2018, July 1). *China Emits More Carbon Dioxide Than The U.S. and EU Combined*. Retrieved from Energy: <https://www.forbes.com/sites/rpapier/2018/07/01/china-emits-more-carbon-dioxide-than-the-u-s-and-eu-combined/#612eac9628c>
- Sheng, Y., & Song, L. (2019). Agricultural production and food consumption in China: A long-term projection. *ScienceDirect*, 5.
- Summit, W. F. (1996). *Rome Declaration on World*. Rome: Food and Agricultural Organization.
- UN. (2015). *Sustainable Development Goals Knowledge Platform*. Retrieved 02 05, 2019, from <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>
- UNDP. (2017). *UNDP support to the implementation*. Retrieved 03 06, 2019, from https://www.undp.org/content/dam/undp/library/Sustainable%20Development/1_Poverty_Jan15_digital.pdf
- WFP. (2019, November 18). *World Food Program: Countries*. Retrieved from China: <https://www.wfp.org/countries/china>

Xie, E. (2019, March 5). *Being Smog; Which industries were among the worst offenders?*
Retrieved from Politics:
<https://www.scmp.com/news/china/politics/article/2188578/beijing-smog-which-industries-were-among-worst-offenders>